



Realisasi Subsidi Untuk LPG 3 Kg



Realisasi 2024
RP 80.2 Triliun



Penerimaan Manfaat
>40.3 Juta Pelanggan



Manfaat yang Dirasakan Masyarakat



Sebelum Subsidi
Rp 42.750/Tabung



Setelah Subsidi
Rp 12.750/Tabung



Ditanggung APBN (30%)
Rp 30.000/Tabung

Kebijakan LPG 3 Kg Terpusat di Pangkalan

DIKLAIM LEBIH MURAH, REALITANYA BIKIN SUSAH

Keluh kesah masyarakat Indonesia terkait keberadaan liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 Kg mencuat di akhir pekan ini. Kebijakan pemerintah resmi melarang penjualan elpiji subsidi melalui pengecer per 1 Februari 2025 membuat 'si melon' sulit ditemukan. Pasalnya, warga wajib membeli komoditas energi itu di pangkalan resmi Pertamina. Buntutnya, karena tidak bisa ditemukan di warung-warung kelontong dan stok di agen juga belum tentu ada, harga LPG naik. Di beberapa wilayah luar Jawa, LPG 3Kg dibanderol hingga Rp 40.000/tabung. Padahal, salah satu alasan dibuat kebijakan penjualan terpusat di pangkalan adalah agar harga lebih murah. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan tegas juga mengatakan harga resmi LPG 3 Kg seharusnya Rp 12.750/tabung. Sebab pemerintah sudah memberikan subsidi sebesar Rp 30.000/tabung. Realitanya, warga lah yang harus bersusah payah. Banyak yang mengaku sudah mendatangi beberapa pangkalan hingga SPBU, tapi stok barangnya kosong. Coba dihitung biaya bensin saat harus berkeliling? Belum lagi potensi batal memasak karena perburuan LPG gagal.

Baca Hal 11....



Buntut Kasus Penembakan di Perairan Selangor Seorang WNI Ditangkap Polisi Malaysia

SELANGOR-Polisi Malaysia mengatakan menangkap seorang warga negara Indonesia (WNI). Warga berjenis kelamin laki-laki itu diduga terlibat dalam insiden penembakan di perairan Tanjung Rhu, Banting, Selangor.

Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, mengatakan tersangka berusia 35 tahun itu ditangkap di Teluk Panglima Garang pada Sabtu (1/2/2025) malam.

"Pria itu masuk ke Malaysia sebagai turis dan penangkapannya dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan polisi atas insiden tersebut. Dia akan ditahan di pengadilan Banting hari ini (Sabtu kemarin, Red) " ujar Hussein, mengutip media lokal Malaysia, New Straits Time, Minggu (2/2/2025)

Penyelidikan polisi hampir rampung dan diharapkan diserahkan ke jaksa penuntut umum pekan depan. Polisi telah memeriksa 14 saksi, termasuk petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) yang terlibat dalam operasi.

Laporan Kemlu RI serta kepolisian Malaysia pelaku penembakan kelima WNI adalah APMM. Otoritas Malaysia menyebut penembakan adalah aksi bela diri dari serangan yang dilakukan para WNI.

Namun, pada Rabu (29/1/2025), KBRI Kuala Lumpur meminta keterangan dari para WNI yang jadi korban luka. WNI itu membantah menyerang aparat keamanan Malaysia.

Menurut laporan NST, insiden terjadi pada 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 pagi. APMM menembak ke arah sebuah kapal yang diduga milik tersangka setelah kapal patroli mereka ditabrak empat kali.

Dalam konfrontasi itu, dua orang di kapal diduga mencoba menyerang petugas APMM dengan parang.

Sekitar pukul 09.00 pagi, APMM menerima laporan adanya kapal yang terombang-ambing di perairan Pantai Banting, Kuala Langat. Ketika petugas tiba, mereka menemukan dua orang di dalamnya.

Satu orang WNI asal Riau dinyatakan meninggal dunia di lokasi, sementara satu lainnya mengalami luka parah dan dilarikan ke Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah di Klang.

Beberapa jam kemudian, tiga orang lainnya, yang juga diduga WNI, ditemukan dengan luka tembak di Rumah Sakit Sultan Idris Shah di Serdang. Ketiganya dalam kondisi sadar dan mengalami luka yang sesuai



Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Khan. (Dok)

dengan tembakan.

Hussein mengatakan kasus ini sedang diselidiki sebagai percobaan pembunuhan berdasarkan Pasal 307 KUHP Malaysia.

Polisi juga menyelidiki dugaan penghalangan petugas negara dalam menjalankan tugas mereka berdasar-

kan Pasal 186 KUHP Malaysia.

Dalam pernyataan terpisah, Direktur Maritim Negara, Kapten Maritim Abdul Muhaimin Muhammad Salleh, mengonfirmasi bahwa kapal fiber berwarna biru yang digunakan para tersangka ditemukan hanyut di barat daya Pulau Carey tanpa nomor

Satu Orang Masih Kritis, 2 Sudah Keluar RS

ATASE Kepolisian KBRI Kuala Lumpur Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengatakan satu WNI korban penembakan di Malaysia masih dalam kondisi kritis. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor.

"Satu orang masih kritis dan dua WNI lainnya sudah keluar dari rumah sakit," kata Juliarman melalui keterangan tertulis, Minggu (2/2/2025).

Juliarman mengatakan ada tiga korban penembakan yang dirawat secara terpisah di Selangor. Pada Jumat pekan lalu, dua orang WNI sudah diperbolehkan pulang ke Indonesia.

Meski demikian, dia mengatakan para korban selamat yang telah pulang tetap dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Malaysia. Namun, kata dia, saat ini proses penyidikan masih difokuskan terhadap aparat keamanan yang menembak WNI tersebut.

Dia mengatakan kasus ini penembakan tersebut ditangani oleh Departemen Kepolisian Selangor atau unit kepolisian setingkat kepolisian resor. "Polisi setempat berkomitmen mengusut kasus ini secara transparan," katanya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mendesak pemerintah Malaysia untuk

menyelidiki kasus penembakan warga negara Indonesia. "Itu hasil penyelidikan kami serahkan nanti ke mereka ya, kami gak ikut menyelidiki," katanya kepada wartawan usai menghadiri peresmian Kuil Murugan di Jalan Bedugul Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (2/2/2025).

Sugiono menekankan bahwa pemerintahan Indonesia telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Malaysia untuk melakukan proses tersebut. "Korban meninggal sudah dibawa kembali ke kampung halamannya. Sudah dimakamkan. Kalau saya tidak salah 3 hari atau 4 harilalu," ujarnya.

Lebih lanjut, Sugiono menjelaskan bahwa dari 4 korban lainnya, saat ini 2 masih dirawat di Rumah Sakit. Sedangkan, dua korban tersisa sudah dipasikan sehat. "Tadinya ada 2 kritis yang pertama sudah keluar dari masa kritisnya, kemudian yang satu lagi sedang dalam pemulihan," tandas Sugiono.

Terpisah, Komnas HAM menyatakan penembakan terhadap lima WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor oleh aparat Malaysia bukanlah kejadian pertama di Negeri Jiran.

"Tahun-tahun sebelumnya peristiwa yang serupa juga pernah

registrasi.

Presiden RI, Prabowo mengakui membahas masalah penembakan 5 WNI saat bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim pekan lalu.

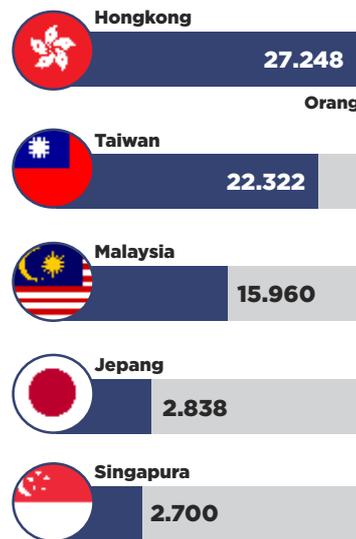
"Itu secara garis besar kita bicarakan," ujar Prabowo usai menghadiri Rapim TNI-Polri 2025 di Gedung Tribrata, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Kelima WNI yang menjadi korban penembakan itu statusnya adalah pekerja migran ilegal. Oleh karena itu, Prabowo meminta WNI yang ingin bekerja di Malaysia mengambil jalur legal.

"Tapi sekali lagi, saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing risikonya negara asing akan bertindak," kata dia. (nst, wid, ist/dya)

5 NEGARA DENGAN PENEMPATAN PMI TERBANYAK

Berdasarkan Negara Penempatan, Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin



terjadi di Malaysia," kata Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah.

Anis meminta pemerintah Indonesia mendorong otoritas Malaysia untuk melakukan penegakkan hukum secara adil. Komnas HAM menyesali peristiwa itu karena melanggar hak atas hidup, sesuatu yang fundamental dan tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun. "Pemerintah punya kewajiban untuk memastikan hak itu dipenuhi." (wid, ant/dya)

Pelantikan Kepala Daerah Diundur Pertengahan Februari 2025 DPR Gelar Rapat, Dasco: Supaya Lebih Banyak dan Serentak

JAKARTA- Jadwal pelantikan kepala daerah diputuskan mundur dari semula 6 Februari 2025, akan dijadwalkan usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mendukung keputusan tersebut. Menurutnya mundurnya jadwal pelantikan akan memperbanyak jumlah kepala daerah yang akan dilantik secara bersamaan.

"Ya, ini kan biar lebih banyak dan serentak, dan juga beda harinya juga tidak terlalu lama rentang waktunya," ujar Dasco dikutip Minggu (2/2/2025).

Menurut Dasco pelantikan kepala daerah mungkin akan dilakukan antara tanggal 18 - 20 Februari 2025. Walau begitu, dirinya belum dapat memastikan, mengingat pemerintah dan DPR masih menunggu hasil putusan MK.

Sejalan dengan ini, DPR dalam pekan depan juga akan melakukan rapat kerja bersama dengan pemerintah, Bawaslu dan KPU untuk membahas perubahan pelantikan kepala daerah ini.

"Mungkin dalam minggu depan DPR akan menggelar rapat konsultasi antara DPR, pemerintah, Bawaslu, dan KPU, demikian," ungkapnya.

Komisi II DPR RI membenarkan mengagendakan kembali menggelar rapat membahas jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Rapat tersebut rencananya digelar pada Senin (3/2/2025), bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP).

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI F-Demokrat Dede Yusuf, saat dikonfirmasi Tribunnews.com, pada Minggu (2/2/2025). "Ya rencananya (Senin) besok, tapi belum dapat konfirmasi dari pak Mendagrinya," ungkap Dede Yusuf.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menambahkan pemerintah memang mengusulkan pelantikan dilakukan pada 18 - 20 Februari 2025.

Sementara terkait dengan lokasi, masih belum ada pembahasan bersama di lintas kementerian dan lembaga.

"Belum ada keputusan mengenai lokasinya belum. Kita menunggu dulu keputusan dan kesepakatan kita terhadap perubahan yang tadinya tanggal 6, ada kemungkinan mundur di tanggal 18 - 20 Februari," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan jadwal pelantikan kepala



(Ilustrasi) Komisi II DPR RI mengagendakan kembali rapat membahas jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024. (dok.ant)

daerah tak sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan mundur dari jadwal semula. Tito mengatakan pelantikan kepala daerah nonsengketa digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK.

"Yang 6 Februari karena disatukan dengan nonsengketa dengan MK, dismissal, maka otomatis yang 6 Februari kita batalkan, kita secepat mungkin lakukan pelantikan yang lebih besar," kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

Namun, Tito belum bisa memastikan kapan tepatnya pelantikan akan digelar. Dia mengatakan pemerintah akan rapat dengan Komisi II DPR pada Senin (3/2).

Tito mengatakan mundurnya jadwal itu lantaran adanya putusan dismissal yang dipercepat oleh MK. Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar pelantikan digelar secara efisien.

"Beliau berprinsip kalau jaraknya nggak jauh, untuk efisiensi sebaiknya satukan saja, yang nonsengketa dan dismissal, untuk efisiensi," ujarnya.

Respon Pemerintah Daerah

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra mengatakan pengisian jabatan kepala organisasi perangkat daerah mundur mengikuti penundaan pelantikan gubernur dan wakil gubernur tanpa sengketa yang rencananya pada 6 Februari 2025. "Iya mundur, harus tunggu (gubernur definitif)," kata dia usai pembukaan Bulan Bahasa Bali 2025 di Denpasar, seperti dikutip dari Antara.

Hingga akhir 2024, sejumlah posisi jabatan tinggi pratama di Provinsi Bali, di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (DLHK), Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Sekretaris DPRD, dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt)

untuk mengisi kekosongan.

Diperkirakan pada 2025 ini posisi kepala dinas atau OPD yang harus diganti sebanyak 14 instansi, sehingga Pemprov Bali harus melakukan seleksi terbuka.

Meski sejumlah kepala OPD sudah pnsniur sejak akhir 2024, agenda seleksi terbuka ini tetap akan dilakukan menunggu Gubernur Bali terpilih Wayan Koster dilantik. "Waktu yang tersisa untuk Pj Gubernur sedikit, sehingga kalau beliau mengisi jabatan kepala perangkat daerah itu waktunya pasti lewat, jadi kenapa Pj tidak mengisi karena kami sudah berhitung waktunya," ujarnya.

Di luar itu, dia merasa tak ada kebijakan atau program yang terbengkalai dengan mundurnya pelantikan Wayan Koster-Giri Prasta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali.

Sementara, Pemerintah Provinsi Lampung tetap mempersiapkan pelaksanaan pelantikan kepala daerah meski ada penjadwalan ulang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung oleh pemerintah pusat. "Tadi sudah melakukan rapat terkait adanya perubahan jadwal pelaksanaan pelantikan gubernur dan wakil gubernur. Dan memang jadwalnya masih tentatif sekitar 18-20 Februari 2025," ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fredy.

Dia mengatakan, meski ada perubahan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih, Pemprov Lampung tetap mempersiapkan pelantikan bagi kepala daerah di provinsi tersebut. "Ini memang belum pasti, namun apa pun keputusannya karena ini berlaku juga untuk seluruh Indonesia maka kami tetap ikut serta dan tetap mempersiapkan pelantikan," kata dia.

Adapun Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

(NTB), menyatakan pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih periode 2025-2030 yang dijadwalkan pada 6 Februari 2025 ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. "Kami baru menerima informasi tersebut secara valid, tapi sampai kapan ditunda belum ada kepastian," ujar Asisten I Setda Kota Mataram H. Lalu Martawang di Mataram.

Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Mataram itu langsung menggelar rapat internal untuk membahas penundaan kegiatan yang sebelumnya telah disiapkan. Salah satunya adalah kegiatan sidang paripurna untuk penyampaian pidato pertama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram terpilih.

Sebelumnya, jika pelantikan dilaksanakan pada 6 Februari 2025, DPRD Kota Mataram telah menyiapkan kegiatan sidang paripurna untuk penyampaian pidato pertama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram pada Senin, 10 Februari 2025. Namun seiring adanya informasi penundaan, maka semua rencana yang disiapkan pada 10 Februari 2025 dibatalkan. "Tidak mungkin kami paripurna dulu, baru pelantikan. Secara teknis dan aturan, dilantik dulu baru paripurna pidato pertama," katanya. (tar, wid, kum, ant/dya)

Perkara Pilkada Di Meja MK

TOTAL
309 PERKARA
Perselisihan Hasil Pemilihan
Kepala Daerah (PHP Kada) 2024

Rincian:
23 PERKARA
PHP Gubernur dan Wakil Gubernur.

49 PERKARA
PHP Walikota dan Wakil Walikota

237 PERKARA
PHP Bupati dan Wakil Bupati.



Catat! Maksimal 2 Bulan Lagi Regulasi Pembatasan Akses Digital Anak Digidok



(Ki-ka) Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, Menteri Komdigi Meutya Hafid, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, menyampaikan aturan tentang perlindungan anak termasuk pembatasan media sosial bagi anak usia dini saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Minggu (2/2/2025). Ant

Tim kerja lintas 4 kementerian tersebut sudah dibentuk. Besok, mereka sudah mulai bekerja dibantu dengan beberapa pihak lainnya. "Tapi yang resmi apa? Tim akan menggodok betul-betul itu esok. Dan kita tahu angka yang memprihatinkan dari kejahatan-kejahatan di dunia maya terhadap anak-anak kita, antaranya pornografi itu Indonesia keempat terbesar. Di dunia di ruang digital. Kemudian dari kesehatan, pakar anak, bisa ditambahkan," tutur dia.

"Kemarin Pak Seskab juga meminta kepada kami untuk mempercepat proses aturan tersebut. Kurang lebih 1-2 bulan," tuturnya.

Jadi besok, tim langsung bekerja untuk merumuskan aturan. Jadi konten-konten untuk anak nantinya dibatasi.

"Tentu selain pornografi, judol, aduan-aduan yang masuk ke kami, di antaranya perundungan kemudian kekerasan seksual terhadap anak di

internet itu menjadi paling banyak isu yang diadukan kepada kementerian kami," tutupnya.

Gangguan Kesehatan Mental hingga Verbal

Sementara, Menkes Budi Gunadi Sadikin bicara soal dua masalah kesehatan mental pada anak akibat ketergantungan media sosial. Ia pun mendukung pengkajian aturan bermedia sosial bagi mereka dengan pembentukan tim kerja lintas kementerian/lembaga.

"Kalau kami dari kesehatan sudah bicara dengan Ibu Meutya Hafid (Menkomdigi), ada 2 masalah kesehatan di anak yang terkait dengan media sosial atau digital yang berlebihan," kata Budi dalam kesempatan yang sama.

Kata Budi, pertama adalah kesehatan mental atau mental disorder. Ada 2 jenis penyakit mental yaitu anxiety disorder dan depression disorder yang banyak terjadi di anak-anak sekarang.

"Karena mereka terekspose secara berlebihan ke sosial media, sehingga mereka melihat sesuatu yang mempengaruhi kondisi jiwanya, kondisi mentalnya," tuturnya.

"Bisa dalam bentuk bisa dalam bentuk ajakan melakukan sesuatu yang tidak benar, itu terjadi," sambung

Menkes.

Isu kesehatan yang disorot Budi terkait medsos adalah kesehatan verbal. Menurutnya, dengan terlalu banyak bermain di internet, ditemukan anak-anak dengan kemampuan bicara yang lambat.

"Nah yang kedua isu kesehatannya Bapak Ibu adalah kesehatan psikomotorik, kesehatan verbal. Akhir-akhir ini kita banyak melihat anak-anak yang terlambat bicara," kata dia.

"Sehingga kita butuh banyak terapi-terapi bicara. Sesudah kita screening, kenapa terlambat bicara? Karena terlampau banyak aktivitasnya itu tidak bermain dengan teman-temannya secara sosial biasa. Tapi menghabiskan waktunya melihat gadget," sambungnya.

"Sehingga akibatnya mereka terlambat untuk bisa bicara dan harus dikirim menemui terapis-terapis bicara."

Oleh karena dua isu itu, Budi mendukung pembatasan medsos untuk anak. Dengan catatan, tidak berlebihan.

"Kenapa kami di kesehatan sangat mendukung untuk pembatasan yang tidak berlebihan dari akses ke media sosial digital karena masalah kesehatan mental, kesehatan jiwa yang kita sudah lihat," tutupnya. (Wid, rls ant/dya)

JAKARTA-Pemerintah mengebut regulasi untuk ruang digital bagi anak. Salah satunya untuk membatasi akses ke konten judi online hingga pornografi. Aturan tersebut ditargetkan selesai maksimal 2 bulan ke depan.

"Jadi (regulasi) ini melibatkan beberapa kementerian. Makanya kami berterima kasih kepada Pak Menkes, Ibu MenPPPA, dan Mendikdasmen yang telah memberikan eselon I dan eselon II untuk ikut dalam tim kerja ini. Sebelumnya diskusinya sudah panjang," kata Meutya di area CFD Jakarta, Minggu (2/2/2025).

Buka-bukaan Kedubes China: Pungli Imigrasi Soetta Capai Rp 32,7Juta

JAKARTA - Kedutaan Besar (Kedubes) China di Republik Indonesia buka-bukaan terkait pungutan liar (pungli) di Bandara Soekarno Hatta. Setidaknya sejak Februari 2024 ada 44 kasus pemerasan, dengan jumlah total sekitar Rp 32.750.000. Pembahasan mengenai hal itu viral di medsos X usai surat aduannya bocor.

"Tahun lalu, dengan bantuan dari Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar Tiongkok telah menjaga kontak dan koordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta, dan telah menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan, dengan jumlah total sekitar Rp 32.750.000 dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara Tiongkok," tulis Kedubes China dalam suratnya kepada Kemlu dikutip Minggu (2/2/2025).

China mengapresiasi langkah bersih-bersih yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Mereka mengganti petugas yang terbukti melakukan pungli.

Kedubes China menyebut pihaknya melampirkan daftar kejadian pungli

antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Kedutaan Besar berharap ke depan Imigrasi memasang tanda-tanda seperti 'Tidak Ada Tip', 'Silakan Laporkan Jika Ada Pemerasan' dalam bahasa Tiongkok, Indonesia, dan Inggris di pos pemeriksaan imigrasi.

"Dan perintah tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan Tiongkok, sehingga mereka tidak menyarankan para pelancong Tiongkok untuk menyuap petugas Imigrasi," tulis Kedubes China. Kedubes China juga menyertakan nomor hotline pengaduan untuk warganya yang merasa dipungli.

Bedol Desa di Imigrasi Soetta

Sebelumnya, beredar informasi perihal 'bedol desa' pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta buntut pungutan liar terhadap warga negara asing (WNA) asal China. Informasinya, sekitar 30 pejabat setingkat kabis, kasubbid, kasi, dan petugas lapangan diperiksa.

Masih dari informasi yang beredar, pencopotan dan pemeriksaan ini karena adanya informasi dari Kedubes China soal data-data warganya yang

dipungli selama 2024 hingga Januari 2025.

"Kalau yang itu (TikToker China buat video pungli) itu benar (hoax). Ini case (kasus) berbeda, data yang berbeda. Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (namanya) ada di data (Kedubes China) dari penugasan di Soetta, kami ganti," kata Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipias) Agus Andrianto, Sabtu (1/2/2025).

Untuk diketahui sebelumnya, ada WNA China yang mengaku dipungli saat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, 16 Januari 2025. Namun terkonfirmasi bahwa soal video TikTok yang dibuat oleh WN China itu palsu alias hoax.

WN China tersebut juga telah ditangkap pihak Imigrasi dan dideportasi. WN China itu pun telah mengakui kesalahannya. Menteri Agus memastikan semua petugas Imigrasi Bandara Soetta yang namanya ada dalam data Kedubes China diperiksa. "Dan saat ini mereka sedang dalam



(Ilustrasi) Petugas memakai kaos bertuliskan No Tipping. Ist

proses pemeriksaan internal," sambung Menteri Agus.

Dia menekankan perombakan menyeluruh terhadap pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soetta diperlukan untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan. Menteri Agus memastikan oknum imigrasi yang melakukan praktik pungli dijatuhi sanksi sesuai derajat pelanggaran.

"Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," ungkapnya. (wid, ist, rls/dya)

Menag Lobi Arab Saudi: Agar Usia Jamaah Tak Dibatasi hingga Tambahan Kuota Haji

JAKARTA-Menteri Agama Nasruddin Umar mengatakan, saat ini masih dilakukan lobi dengan pihak Arab Saudi terkait dengan penambahan kuota pendamping haji tahun 2025.

Pihaknya juga terus menegosiasikan batas usia maksimal bagi jamaah haji tahun 2025 kepada pemerintah Arab Saudi. "Ya, kami juga wacana kan ke situ. Jangan kita dibatasi berdasarkan faktor usia, tetapi berdasarkan faktor kesiapan hati dan kemampuan," ujar Nasruddin Umar saat ditemui di Kuil Murugan, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (2/2/2025).

Nasruddin mengatakan, kesehatan dan kemampuan jamaah untuk naik haji itu relatif. "Ada orang di atas 90 tahun tapi segar. Ada orang di bawah 60 tahun, tapi pakai kursi roda, jadi itu agak relatif ya kan," lanjut dia.

Menurut Nasruddin, saat ini juga ada jamaah yang sudah menunggu lama untuk bisa naik haji, bahkan hingga puluhan tahun. Jika tahun ini jamaah tidak bisa berangkat karena terkendala masalah usia, hal ini tidak adil.

"Karena, (jamaah) kita (hingga) 48 tahun harus menunggu, tiba-tiba

harusnya bisa hari ini. Usianya tidak memenuhi syarat, kekecewaannya besar sekali," kata Nasruddin.

Dia mengatakan, saat ini proses diskusi masih dilakukan dengan pemerintah Arab Saudi. Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Arab Saudi berencana membatasi usia jamaah haji yang diizinkan berangkat ke Tanah Suci.

Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, mengonfirmasi kabar batasan usia jamaah haji tersebut. Meski hingga kini pihaknya belum menerima surat resmi dari Kerajaan Arab Saudi.

"Jadi ini sedang kita mitigasi, meskipun belum resmi. Kami masih menunggu suratnya, pimpinan, dari Kerajaan Saudi. Ada kebijakan baru yang kami dengar kemarin terkait pembatasan usia," ujar Hilman dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Menurut informasi sementara, Arab Saudi akan menetapkan batas usia maksimal jamaah haji, yaitu 90 tahun. Kebijakan ini juga disertai pembatasan persentase jamaah lansia berusia 70 hingga 80 tahun ke atas.

"Suratnya akan segera dikirim. Informasi sementara, mungkin tidak akan memberikan izin pada jamaah di atas 90 tahun," jelas Hilman.

Hilman menyoroti fakta bahwa masih ada jamaah asal Indonesia yang berusia 100 tahun turut menunaikan ibadah haji. "Jumlahnya mungkin tidak banyak, tapi menarik bahwa ada kebijakan ini. Kami akan terus memantau perkembangan," tambah dia.

Ada Kesulitan Bahasa

Penambahan kuota pendamping haji tahun 2025 juga belum ada kabar. "Iya, jadi sebetulnya kita lobi sekarang ini adalah penambahan pendamping," ujar Nasruddin Umar.

Nasruddin mengatakan, akan lebih memudahkan jika pendamping jamaah haji Indonesia berasal dari negara sendiri. Hal yang menurutnya perlu dipertimbangkan adalah kendala bahasa jika pendamping



Menteri Agama Nasruddin Umar saat ditemui di Kuil Murugan, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (2/2/2025). (Ist)

jamaah haji asal Indonesia merupakan warga Arab Saudi.

"Pertama ada kesulitan dari segi bahasa. Dia (pendamping dari Arab) enggak bisa bahasa Indonesia, jamaah haji kita itu kan banyak yang (bisa) bahasa Arabnya, tapi juga terbata-bata kan, jadi alangkah baiknya kalau pendamping mereka itu dari asal mereka berada," lanjut Nasruddin.

Dia mengatakan, saat ini proses diskusi dan lobi masih dilakukan. Tapi, Indonesia masih menunggu keputusan dari Arab Saudi selaku tuan rumah. (wid,rls,ant/dya)

Mendikdasmen: Coding dan AI Masuk Kurikulum Sekolah Semester Depan



Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti bersama anak-anak di Jakarta, Minggu (2/2/2025). (Do.Kemendikdasmen)

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan mata pelajaran coding dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI)

(2/2/2025).

Mu'ti menilai pembelajaran berkaitan dua materi tersebut penting, bahkan harus diberikan sejak jenjang

akan menjadi bagian dari kurikulum sekolah mulai semester depan. Kedua subjek tersebut, kata dia, bukan termasuk mata pelajaran wajib melainkan mata pelajaran pilihan.

"Terkait dengan pendidikan coding dan artificial intelligence (AI) yang mulai semester depan akan menjadi kurikulum atau mata pelajaran pilihan di sekolah," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di depan kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat pada Minggu

sekolah dasar. Namun, ia melanjutkan dalam penerapannya nanti tetap perlu disertai arahan terkait pemanfaatannya, mengingat era serba digital seperti saat ini.

"Tentu saja penguasaan teknologi itu penting, bahkan memang harus, tetapi penggunaannya tentu harus dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat," kata Mu'ti.

Dia menyebut usulan rencana tersebut telah didukung penuh oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam upaya literasi digital. Kedua kementerian sepakat untuk bersinergi dalam mewujudkan generasi yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk hal-hal positif.

"Sehingga mudah-mudahan nanti kami bisa terus bersinergi untuk membangun generasi yang tidak hanya menguasai teknologi tapi juga menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa," tuturnya.

Adapun rencana mengikutsertakan mata pelajaran coding dan AI ke dalam kurikulum sekolah merupakan usulan yang dicetuskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Jangan sampai kita kalah dengan India. Karena sekali lagi Bapak-Ibu, untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita ingin lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lain-lainnya," kata Gibran saat memberi sambutan dalam rapat koordinasi evaluasi pendidikan dasar dan menengah di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 November 2024.

Mu'ti, saat memberikan keterangan pers di sela rapat koordinasi tersebut mengatakan mata pelajaran pilihan coding dan AI ini bakal diberlakukan di sekolah yang sudah memiliki sarana yang mumpuni. (wid,rls,ist/dya)

PR Besar Pemkab Malang, Perbaiki 282 Sekolah Rusak Ditargetkan Rampung 2026

MALANG - Sebanyak 282 sekolah di Kabupaten Malang yang mengalami kerusakan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Untuk menuntaskan persoalan ini, Bupati Malang, Sanusi, menargetkan semua dapat diperbaiki secara bertahap dan rampung sepenuhnya pada tahun 2026.

Target tersebut disampaikan Sanusi usai melakukan kegiatan Sumbang Desa Gotong Royong Membangun Kabupaten Malang Makmur, di Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Sanusi juga meninjau langsung kondisi salah satu sekolah yang mengalami kerusakan cukup parah di wilayah tersebut.

"Kemarin setelah sambang desa kami sudah melakukan evaluasi, rapat koordinasi, karena di sana (Jabung) juga ada sekolah yang rusak. Jadi untuk sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan wajib dibenahi pada tahun 2025. Harapannya, nanti di tahun 2026 sudah tidak ada lagi sekolah rusak di Kabupaten Malang," ujar Sanusi, Minggu (2/2/2025).

Sanusi menjelaskan, perbaikan sekolah akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada tahun 2025 difokuskan untuk membenahi sekolah-sekolah dengan kategori kerusakan berat. Kemudian, pada tahun 2026, Pemkab Malang akan menuntaskan perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang.

"Tahun 2025 kami targetkan semua sekolah dengan kerusakan berat sudah diperbaiki. Sisanya akan dituntaskan di tahun 2026. Anggaran akan kami alokasikan secara bertahap untuk memastikan seluruh sekolah di Kabupaten Malang berada dalam kondisi layak," jelasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang, terdapat total 282 sekolah rusak yang terdiri dari 206 Sekolah Dasar (SD) dan 76 Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik negeri maupun swasta.

Sanusi mengungkapkan, pada tahap awal, Pemkab Malang akan memprioritaskan perbaikan di 85 SD yang mengalami kerusakan berat.

Menurutnya, untuk satu ruang kelas atau lokal, Pemkab Malang akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 70 juta.

Selain memperbaiki bangunan sekolah, Pemkab Malang juga akan melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah yang jumlah siswanya sedikit. Sanusi menyampaikan, beberapa sekolah yang memiliki kurang dari 20 siswa per kelas rencananya akan digabung dengan sekolah terdekat.

Menurutnya, langkah ini diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar-mengajar, sekaligus mengurangi beban anggaran perbaikan sekolah.

"Jika ada sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 20 per kelas, nanti akan kami gabungkan dengan sekolah terdekat



Salah satu sekolah rusak di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. (dol. ist)

agar lebih efektif," kata Sanusi.

Dalam kesempatannya ini, Sanusi juga menyoroti kekurangan tenaga pendidik berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Malang. Saat ini, dikatakannya banyak SD yang hanya memiliki dua hingga tiga guru berstatus PNS. Dengan melakukan merger sekolah, Sanusi berharap permasalahan kekurangan guru PNS tersebut juga dapat teratasi. (Santi/Dya)

Pemkot Malang Genjot Ekspor Produk UMKM, Target Awal Rp 200 Miliar



Ilustrasi UMKM Kota Malang. (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang semakin serius mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dapat menembus pasar global. Di tahun 2025 ini, ditargetkan ekspor berbagai produk unggulan UMKM ke beberapa negara, dengan total nilai mencapai Rp 200 miliar.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

(Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan tahap awal ekspor produk UMKM sebenarnya dijadwalkan pada Januari 2025. Namun, karena beberapa persiapan teknis yang masih harus disempurnakan, menurutnya pengiriman harus diundur dan dijadwalkan maksimal hingga akhir Februari 2025 mendatang.

"Ekspor ini akan terus kami dukung. Kalau terdekat ini kami sudah merencanakan ekspor produk keripik dari UMKM Kota Malang ke New Zealand dan Australia. Paling cepat, pengiriman akan dilakukan pada akhir Februari, karena ada beberapa persiapan yang harus diselesaikan," ujar Eko, Minggu (2/2/2025).

Tak hanya keripik, Eko menyebut-kam Pemkot Malang juga memberikan dampingan untuk mengeksport komoditas lain yang

diminati pasar internasional, salah satunya yakni daun pisang. Menurutnya, produk ini akan dikirim dalam satu kontainer bersama keripik untuk memenuhi kebutuhan kuliner di dua negara tujuan ekspor.

"Ada juga daun pisang yang akan dikirim ke New Zealand dan Australia, karena di sana ternyata banyak digunakan untuk perlengkapan memasak. Ini kan juga cukup unik. Kalau gak salah totalnya sekitar 25 ton atau 25 ribu kilogram," jelasnya.

Eko menambahkan, ekspor di tahun 2025 ini akan melibatkan sekitar 100 pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan legalitas usaha. Di antaranya, para pelaku UMKM harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta telah mengantongi izin edar dari instansi terkait.

"Kalau semua syarat sudah terpenuhi dan ada permintaan dari pasar, kami siap memfasilitasi proses ekspornya. 100 UMKM itu total nilai ekspor bisa Dp 200 miliar," tegasnya.

Langkah Pemkot Malang ini

merupakan kelanjutan dari upaya sebelumnya dalam memperluas pasar ekspor bagi UMKM lokal. Sebelumnya, Eko menyampaikan Pemkot telah berhasil memfasilitasi ekspor pelet kayu ke Korea Selatan, yang mendapat sambutan positif dari pasar luar negeri.

Menurut Eko, Pemkot Malang terus berupaya agar lebih banyak produk UMKM dapat naik kelas dan bersaing di pasar internasional. Oleh karena itu, selain membuka jalur ekspor, pihaknya juga menyiapkan berbagai pelatihan guna meningkatkan kualitas produk dan daya saing pelaku UMKM.

"Saat ini, jumlah UMKM di Kota Malang mencapai sekitar 48 ribu. Kami ingin semakin banyak dari mereka yang bisa menembus pasar ekspor," katanya.

Melalui inisiatif ini, Eko berharap para pelaku UMKM semakin percaya diri dan mampu memperluas jangkauan pasar mereka ke kancan global. "Kami akan terus mendukung UMKM agar berkembang dan semakin kompetitif," pungkasnya. (Santi/Dya)

Perang Dagang 2.0 Dimulai

Saling Balas AS dengan China, Meksiko dan Kanada

WASHINGTON - China mengancam pengenaan tarif bea masuk tambahan sebesar 10% atas barang eksportnya. Kebijakan tarif ini akan berlaku mulai Selasa (4/2/2025). Kendati dikenakan tarif yang lebih tinggi, China tetap terbuka untuk melakukan perundingan dengan Amerika Serikat.

Ini diyakini dapat menghindari konflik yang semakin dalam. Beijing akan menentang tarif Presiden Donald Trump dan membawa masalah ini ke meja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

China menegaskan akan mengambil "tindakan balasan" yang tidak ditentukan sebagai tanggapan atas pengenaan tarif tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Keuangan dan Perdagangan China.

Mengutip dari CNA, Kementerian Perdagangan China bahkan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah Trump "sangat melanggar" aturan perdagangan internasional, mendesak AS untuk "terlibat dalam dialog yang jujur dan memperkuat kerja sama".

Mengajukan gugatan hukum ke WTO akan menjadi langkah yang sebagian besar bersifat simbolis yang juga telah diambil Beijing terhadap tarif kendaraan listrik buatan China oleh Uni Eropa.

Selama berminggu-minggu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan Beijing yakin tidak ada pemenang dalam perang dagang.

Tidak hanya China, Trump juga memutuskan pengenaan tarif 25% untuk Kanada dan Meksiko. Ketetapan ini sudah dituangkan dalam perintah presiden yang diteken Trump pada Sabtu kemarin (1/2/2025).

Dalam pernyataannya, Trump menekankan bahwa Beijing perlu menghentikan aliran fentanil, opioid yang mematikan, ke Amerika Serikat. Terkait dengan fentanil, China menolak dengan tajam.

"Fentanil adalah masalah Amerika," kata Kementerian Luar Negeri China. "Pihak China telah melakukan kerja sama antinarkotika yang ekstensif dengan Amerika Serikat dan mencapai hasil yang luar biasa."

Diketahui pada Minggu (2/2/2025), Trump menandatangani kebijakan ekonomi yang telah lama dijanjikannya di klub Mar-a-Lago miliknya. Pemerintahan Trump mengatakan tarif tersebut ditujukan untuk mengekang aliran obat-obatan terlarang dan imigran gelap ke AS.

Tetapi, tarif tersebut diprediksi membuat kenaikan harga bagi konsumen AS untuk berbagai barang mulai dari alpukat, sepatu kets hingga mobil.



Donald Trump, di Mar-a-Lago, rumahnya di Palm Beach (Florida), bulan lalu. (REUTERS)

Trump, dalam tindakan eksekutifnya, mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional. Dia menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional yang dikenal sebagai 'IEEPA' yang memberi wewenang kepada Presiden AS untuk mengelola impor secara sepihak selama keadaan darurat nasional. Tarif tersebut akan mulai berlaku pada Selasa mendatang pukul 12.01 waktu setempat.

Kanada, Meksiko Membalas

Sementara itu, Kanada dan Meksiko juga telah mengumumkan rencana untuk membalas.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan negaranya akan membalas tarif baru Trump dengan mengenakan tarif sebesar 25% pada barang-barang AS mulai dari minuman hingga peralatan.

Ketika hubungan antara sekutu

lama yang berbagi perbatasan darat terpanjang di dunia mencapai titik terendah, Trudeau mengatakan dalam konferensi pers bahwa ia akan mengenakan tarif pada barang-barang AS senilai C\$155 miliar (US\$107 miliar).

Tarif senilai C\$30 miliar akan mulai berlaku pada hari Selasa, hari yang sama dengan tarif Trump, dan bea masuk pada sisa C\$125 miliar dalam 21 hari, katanya.

Adapun, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum telah memerintahkan tarif pembalasan. Dalam posting yang panjang di X, Sheinbaum mengatakan pemerintahnya menginginkan dialog daripada konfrontasi dengan tetangganya ini, tetapi Meksiko terpaksa menanggapi dengan cara yang sama.

"Saya telah menginstruksikan menteri ekonomi saya untuk melaksanakan rencana B yang telah kami kerjakan, yang mencakup tindakan tarif dan non-tarif untuk membela kepentingan Meksiko," tulis Sheinbaum, tanpa merinci barang-barang AS apa yang akan menjadi target pemerintahnya. (Sputnik, Reuters, ist/nei)

Indonesia Siaga Dampak Ekonomi

P E M E R I N T A H m e n g a k u i mewaspadai dampak Trump 2.0 terhadap ekonomi Indonesia. Seperti diketahui, saat Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) pada periode pertamanya, sosok ini memulai perang dagang AS versus China. Selanjutnya, jelang pelantikan jilid dua, Trump kerap berkomentar keras tentang perlunya tarif tinggi bagi negara yang merugikan AS.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa dinamika global saat ini akan berdampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia kedepan.

"Sejumlah risiko tentu masih akan kita hadapi, seperti volatilitas harga komoditas, kemudian tingkat suku bunga yang relatif tinggi, dan tentunya kebijakan perdagangan dari pemerintahan Amerika yang sering kita sebut sebagai Trump 2.0, serta kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim," kata Airlangga, dikutip Minggu (2/2/2025).

Tak hanya ekonomi nasional, ketidakpastian global tersebut juga membuat proyeksi ekonomi global 2025 ini hanya diperkirakan tumbuh di kisaran 3,2%, yang, kata Airlangga, berada di bawah rata-rata historis.

"Namun ada yang juga cukup

membanggakan, kalau dari segi PPP, purchasing power parity, ekonomi Indonesia sudah masuk di nomor delapan. Itu lebih tinggi dari Italia, Prancis, dan ini suatu capaian yang baik," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan ketidakpastian global yang disebabkan perang dagang AS versus China ini juga bisa berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Kendati demikian, menurutnya, hal ini bisa dimanfaatkan Indonesia.

Faisal menjelaskan, dalam kebijakan dagang Trump jilid pertama dahulu, perang dagang telah mendorong perusahaan-perusahaan yang tadinya berinvestasi ke China hengkang keluar dan mencari tujuan baru di negara-negara ASEAN. Limpahan tersebut, menurutnya, bisa ditangkap oleh Indonesia.

Walaupun yang diperoleh Indonesia dari relokasi manufaktur yang keluar dari China itu relatif sedikit. Tapi untuk ke depan, peluang itu tetap terbuka, tergantung sejauh mana pemerintah memperbaiki, belajar dari kelemahan yang sebelumnya, dan lebih agresif untuk menggaet investasi potensial dari relokasi keluar dari China tersebut," kata Faisal.

Sementara itu Direktur Eksekutif

Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, keputusan Trump yang menarik mandatori sejumlah kebijakan pendahulunya, Joe Biden, terkait pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle) dapat membuat harga mineral seperti nikel, litium, dan kobalt turun.

Penurunan harga komoditas tersebut, menurutnya, akan berimbas pada minat investor di sektor hilirisasi. Bagi Indonesia sendiri, realisasi investasi sepanjang 2024 sebesar Rp1.714,2 triliun, hampir seperempatnya atau 23,8%, merupakan investasi di sektor hilirisasi yang mana didominasi oleh hilirisasi mineral tambang.

Realisasi investasi terkait hilirisasi itu tumbuh 8,63% year on year (yoy). Rinciannya, portofolio investasi terbanyak terkait dengan bidang mineral yang mencapai Rp245,2 triliun, dengan sektor terbesar yaitu nikel (Rp153,2 triliun), tembaga (Rp68,5 triliun), dan bauksit (Rp21,8 triliun).

"Ketika harga nikel turun, ekspor dari hilirisasi tambang juga akan terganggu. Jadi, porsi investasi yang berasal dari sektor hilirisasi tambang mineral diperkirakan akan tumbuh rendah, porsinya menurun. Jadi kalau 23%, mungkin tahun 2025 cuma 15%," kata Bhima. (ist,rls/nei)

Diet Mediterania Makanan dari Alam



PENELITIAN menunjukkan bahwa pola makan memiliki pengaruh besar terhadap risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Pengamatan dari sebuah studi pada tahun 1960-an menemukan bahwa penyakit kardiovaskular terkait dengan angka kematian yang lebih rendah di beberapa negara Mediterania, seperti Yunani dan Italia, dibandingkan dengan AS dan Eropa utara.

Studi-studi terbaru menghubungkan diet Mediterania dengan faktor risiko penyakit jantung yang lebih rendah, seperti kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi.

Saat ini, diet Mediterania merupakan salah satu rencana makan sehat yang direkomendasikan oleh para ahli gizi Amerika. Diet ini juga diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

O) sebagai pola makan sehat.

Banyak budaya memiliki pola makan yang mirip dengan diet Mediterania, termasuk Jepang, misalnya. Selain itu, diet lain juga memiliki beberapa rekomendasi yang sama dengan diet Mediterania.

Dua contoh di antaranya adalah diet Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) dan Pedoman Diet untuk Orang Amerika.

Penelitian menunjukkan bahwa diet Mediterania merupakan langkah yang penting untuk diikuti dalam jangka panjang agar jantung bisa mendapatkan manfaatnya.

Bagaimana Cara Mengaplikasikan Diet Mediterania?

1. Makan Lebih Banyak Buah dan Sayuran

Setiap hari, usahakan untuk mengonsumsi 2 hingga 3 porsi buah dan empat atau lebih porsi sayuran. Satu porsi buah setara dengan satu buah sedang utuh atau satu cangkir buah cincang.

Satu porsi sayuran setara dengan dua cangkir sayuran berdaun, satu cangkir sayuran mentah, atau setengah cangkir sayuran yang dimasak.

2. Pilih Biji-bijian Utuh

Beralihlah ke roti, sereal, dan pasta dari biji-bijian utuh. Sahabat Fimela juga bisa mencoba biji-bijian utuh lainnya, seperti bulgur, gandum, dan farro. Jika Sahabat Fimela makan sekitar 2.000 kalori sehari, usahakan untuk mengonsumsi setidaknya 3 ons biji-bijian utuh.

Sahabat Fimela bisa mendapatkan 1 ons dari seiris roti, satu cangkir sereal siap saji, atau setengah cangkir nasi atau pasta yang dimasak. Baca label Fakta Gizi untuk mengetahui berapa banyak produk dalam satu porsi.

3. Gunakan Lemak Tak Jenuh dari Tanaman

Mengganti lemak jenuh dengan lemak tak jenuh dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Misalnya, Sahabat Fimela bisa mengganti mentega dengan minyak zaitun, kanola, minyak safflower atau minyak bunga matahari dalam memasak makanan.

Alih-alih menggunakan mentega atau margarin di atas roti, Sahabat Fimela bisa menggunakan selai kacang atau biji-bijian di atas roti panggang atau apel.

4. Makan Lebih Banyak Makanan Laut

Makan ikan atau kerang 2 hingga 3 kali seminggu. Anak-anak dan orang ibu hamil atau menyusui mungkin ingin membatasi jenis ikan tertentu karena kadar merkuri. Satu porsi ikan sekitar 3 hingga 5 ons untuk orang dewasa.

Itu kira-kira sebesar setumpuk kartu. Badan Pengawas Obat dan Makanan AS merekomendasikan porsi lebih kecil untuk anak-anak dua kali seminggu.

Tuna, salmon, trout, mackerel, dan herring segar atau kemasan air adalah pilihan yang sehat.

Hindari ikan yang digoreng dalam minyak dalam.

5. Konsumsi Kacang

Setiap minggu, usahakan untuk makan empat porsi kacang mentah tanpa garam. Satu porsi setara dengan seperempat cangkir.

6. Nikmati Produk Susu

Beberapa pilihan yang baik adalah susu skim atau 1%, keju cottage rendah lemak, dan yogurt Yunani atau yogurt polos rendah lemak. Batasi jumlah keju yang dikonsumsi. Satu porsi kira-kira seukuran empat dadu.

Selain itu, kurangi konsumsi produk susu berlemak tinggi. Ini termasuk susu full cream dan 2%, mentega, margarin, dan es krim.

7. Kurangi Daging Merah dan Daging Olah

Makan lebih banyak ikan, unggas, atau kacang-kacangan sebagai penggantinya. Jika Sahabat Fimela ingin mengonsumsi daging, pastikan itu daging tanpa lemak dan konsumsilah dalam porsi kecil. Sebelum memasaknya, cobalah untuk menghilangkan lemak yang terlihat.

8. Beri Rasa pada Makanan dengan Bumbu

Rempah-rempah dan bumbu dapat meningkatkan rasa dan mengurangi kebutuhan akan garam. Dengan mengikuti prinsip-prinsip diet Mediterania, kita tidak hanya dapat menikmati makanan yang lezat dan bergizi, tetapi juga mendukung kesehatan jangka panjang, terutama dalam mengurangi risiko penyakit jantung dan meningkatkan kualitas hidup.

Pola makan yang kaya akan buah, sayuran, biji-bijian utuh, lemak sehat, dan protein nabati atau hewani yang rendah lemak, merupakan langkah positif menuju gaya hidup yang lebih sehat. (nei,ist/dya)



Startup Lonestar Bangun Data Center di Bulan

STARTUP teknologi asal Amerika Serikat, Lonestar Data Holdings, mengumumkan rencana ambisius untuk membangun pusat data pertama di permukaan Bulan. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan solusi penyimpanan data yang lebih aman dan efisien, sekaligus mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pusat data di Bumi.

Startup Lonestar rencananya akan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX untuk membawa pusat data yang telah selesai dirakit. Nantinya, teknologi ini akan diintegrasikan ke wahana pendarat Athena milik Intuitive Machine.

Freedom Data Center milik Lonestar akan diluncurkan ke Bulan pada akhir Februari setelah integrasi ke wahana Athena rampung dilakukan. Selama program inovatif ini berjalan, perusahaan akan memastikan misinya berjalan dengan lancar.

“Ide menggunakan satelit terbesar di Bumi sebagai titik jangkar, cukup jauh sehingga kita dapat menjaga keamanan (komunikasi,” ujar Chris Stott, CEO Lonestar sebagaimana dikutip Reuters.

Ada alasan kenapa perusahaan melirik Bulan sebagai tempat menyimpan data center. Biaya peluncuran roket yang kini lebih murah, energi matahari yang melimpah di Bulan (Bulan memiliki paparan sinar matahari yang dapat digunakan untuk sumber daya operasional), dan sistem pendingin hemat biaya (Lingkungan Bulan yang dingin dapat mengurangi kebutuhan sistem pendingin buatan, sehingga lebih hemat energi), telah memicu

perlombaan di antara startup untuk mengubah luar angkasa menjadi pusat data raksasa, untuk memenuhi kebutuhan komputasi teknologi yang kini semakin meningkat, termasuk AI, Keamanan Data (dengan berada jauh dari Bumi, pusat data ini lebih terlindungi dari ancaman bencana alam, serangan siber, atau gangguan lainnya).

Pengembangan pusat data sendiri saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terutama di era AI yang membutuhkan komputasi super besar. Ini membuat kebutuhan akan energi makin membengkak, dan dapat mengganggu target pengurangan emisi karbon Bumi di masa depan. Oleh karena itu, Bulan dinilai menjadi tempat ideal untuk menempatkan pusat data berbasis AI.

Nantinya, Freedom Data Center akan menggunakan energi matahari dan solid-state drive (SSD) yang memakai sebuah sistem pendingin alami. Operasi pusat data Bulan juga akan memiliki cadangan berbasis darat yang ada di fasilitas pusat data Flexential di Tampa,

Florida.

Proyek ini telah menarik sejumlah klien besar. Beberapa di antaranya adalah pemerintah negara bagian Florida, pemerintah Isle of Man, perusahaan AI Valkyrie, dan band pop rock Imagine Dragons.

Kendati begitu, pembangunan Freedom Data Center di luar angkasa tidaklah mudah. Lonestar perlu mempersiapkan perawatan yang jauh lebih rumit, meningkatkan teknologinya di ruang lingkup yang terbatas, dan mengeluarkan lebih banyak biaya untuk peluncurannya. Ada juga risiko roket gagal meluncur atau mendarat di Bulan.

“Saat Anda meluncurkan satelit ke luar angkasa, semuanya biner. Jika gagal, berarti satelit itu mati. Tidak ada cara untuk memulihkannya. Tidak ada cara memperbaikinya,” kata Chris Quilty, CEO perusahaan riset industri

Quilty Space.

Meskipun memiliki potensi besar, proyek ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas perawatan, keterbatasan peningkatan teknologi, serta risiko kegagalan dalam proses peluncuran. Namun, Lonestar optimis bahwa keberhasilan proyek ini dapat membuka peluang baru bagi pengelolaan data di luar angkasa.

Dengan langkah inovatif ini, Lonestar berharap dapat merevolusi industri pusat data global dan memanfaatkan luar angkasa sebagai solusi penyimpanan data yang lebih berkelanjutan. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN | TRENGGALEK: TINA W | NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | DKI JAKARTA: FUAD HASSAN | LOMBOK BARAT: MUHAYYAN | PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI**

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL.

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Film Gowok Kamasutra Jawa Berkompetisi di IFFR

FILM garapan Hanung Bramantyo, Gowok Kamasutra Jawa resmi bakal bersaing di Big Screen Competition International Film Festival Rotterdam (IFFR) pada 30 Januari hingga 9 Februari 2025.

Di Big Screen Competition, film dengan judul internasional Gowok-Javanese Kamasutra ini akan bersaing dengan 12 film dari mancanegara.

Big Screen Competition adalah kompetisi bergengsi, penghargaan untuk film-film yang berani mengeksplorasi estetika namun tetap menonjolkan unsur entertainment.

"Kami sangat bangga bahwa film ini terpilih berkompetisi di Big Screen Competition di International Film Festival Rotterdam (IFFR) 2025. Ini membuktikan bahwa kisah-kisah lokal dengan kekayaan budaya yang kuat dapat diapresiasi di panggung internasional," kata produser film Raam Punjabi, lewat keterangan resmi. Hal senada diungkap sutradara Hanung Bramantyo. Sempat pesimis, dia bersyukur bahwa Gowok Kamasutra Jawa terpilih untuk berkompetisi di Big Screen Competition.

"Saya sempat berpikir bahwa kemungkinan, ini hanya seleksi official saja. Saat saya tahu Gowok berkompetisi, tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi selain berterima kasih dan bersyukur," ujar Hanung. Hanung menyebut capaian ini adalah bagian dari doa-doanya yang terjawab. Selama ini Hanung berharap agar filmnya tak hanya dinikmati masyarakat Indonesia saja.

"Jika memang IFFR ini adalah jalan sebagai awal karya saya bisa

menembus dunia yang lebih luas lagi, maka saya benar-benar bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah mengabulkan doa saya," jelas Hanung. Hanung berpendapat, ada daya tarik universal dari kisah yang diangkat dalam film ini.

"Kisah Gowok ini sangat seksi. Mungkin, di Indonesia, tema seperti ini akan menjadi kontroversial. Saya yakin ketika di luar negeri tema ini menjadi tema yang sangat seksi seperti film Tuhan Izinkan Aku Berdosa," ucap Hanung.

Di IFFR, Gowok Kamasutra Jawa diputar pada Minggu (2 Februari 2025), Senin (3 Februari 2025), Rabu (5 Februari 2025) dan Kamis (6 Februari 2025). Mengambil era 1955-1965, film Gowok Kamasutra Jawa berkisah tentang seorang perempuan yang berprofesi sebagai guru yang mengajarkan keterampilan seksual bagi calon pengantin pria Indonesia yang hendak menikah.

Sebelumnya, Hanung Bramantyo sukses dengan film Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Suami Zaskia Adya Mecca itu sangat bersyukur Gowok Kamasutra Jawa terpilih untuk berkompetisi di Big Screen Competition.

"Saya sempat berpikir bahwa kemungkinan ini hanya seleksi official saja, tapi saat saya tahu Gowok mendapat kesempatan untuk berkompetisi, tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi selain berterima kasih dan bersyukur," kta Hanung Bramantyo.

Hanung Bramantyo merasa ini adalah berkah atas doanya saat beribadah haji. Pencapaiannya sebagai sutradara ingin dilihat hingga industri

film internasional.

"Pada saat itu, saya berdoa agar karya-karya film saya tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia, negara saya saja, tapi bisa juga menembus ke seluruh dunia. Dan jika memang IFFR ini adalah jalan sebagai awal karya saya bisa menembus dunia yang lebih luas lagi, maka saya benar-benar bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah mengabulkan doa saya," lanjutnya. Reza Rahadian dalam cuplikan adegan Gowok Kamasutra Jawa. Foto: dok. MVP Pictures

Menanggapi terpilihnya Gowok Kamasutra Jawa di Big Screen Competition, Hanung mengungkapkan pandangannya tentang daya tarik universal dari kisah yang diangkat dalam film ini.

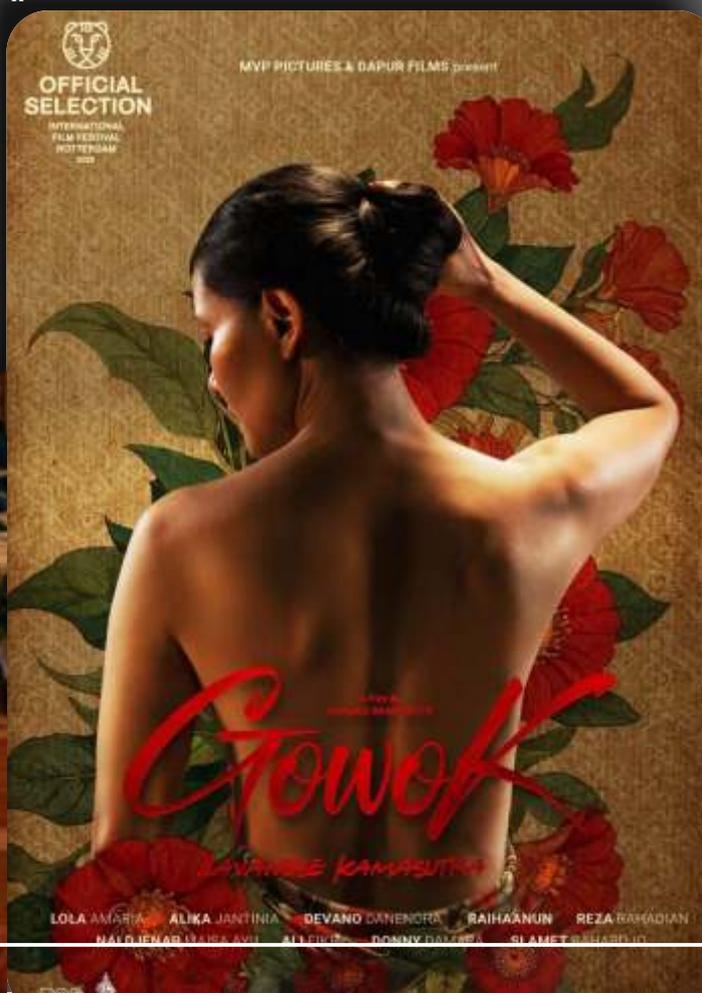
"Kisah Gowok ini memang sangat seksi. Saya rasa bukan hanya di mata masyarakat Indonesia, tapi juga untuk universal. Mungkin di Indonesia sendiri tema seperti ini akan menjadi kontroversial, tapi saya yakin ketika di luar negeri tema ini menjadi tema yang sangat seksi seperti film Tuhan Izinkan Aku Berdosa," ungkap Hanung Bramantyo.

G o w o k
Kamasutra Jawa akan diputar pada M i n g g u (2/2/2025), S e n i n (3/2/2025), R a b u (5/2/2025) dan Kamis (6/2/2025). Film Gowok

Kamasutra Jawa berkisah tentang seorang perempuan yang berprofesi sebagai guru yang mengajarkan keterampilan seksual bagi calon pengantin pria yang hendak menikah. Dia mengajarkan pada calon pengantin pria bagaimana cara memuaskan istrinya di atas ranjang. Film yang dibintangi oleh Raihaanun, Lola Amaria, Alike Jantinia, Devano Danendra, Reza Rahadian, dan Nai Djenar Maisa Ayu ini mengambil latar era 1955-1965.

Hal itu akan diajarkan lewat kitab-kitab Kuno warisan leluhur seperti Centhini, Nitimani, Wulangreh, Gowok berupaya mengajari laki-laki bagaimana agar perempuan mendapatkan haknya untuk dicintai sepenuh hati, dihargai, dipuaskan, meski hanya di atas ranjang. Pasca peristiwa 1965, profesi Gowok dihilangkan karena dianggap sebagai praktek pelacuran terselubung. Kini keberadaannya tinggal legenda.

Selain nama-nama di atas, Gowok Kamasutra Jawa juga dibintangi oleh Ali Fikry, Donny Damara, Slamet Rahardjo, Nayla Purnama, Aldy Bisl, Ayu Prasiska, Khiva Rayanka, Runny Rudyanti, Wavi Zihan, dan Annisa Hertami. (nei,ist/dya)



Diklaim Lebih ... (dari Hal 1)

KEBIJAKAN pemerintah terkait larangan penjualan LPG 3 kg melalui pengecer resmi berlaku per 1 Februari 2025. Aturan tersebut bertujuan untuk memastikan distribusi subsidi gas yang lebih tepat sasaran.

Tak hanya itu, melalui larangan penjualan LPG 3 kg, pemerintah juga ingin menekan potensi penyimpangan dan memastikan pengendalian harga di masyarakat.

Namun melihat realita di masyarakat, pakar Kebijakan Publik UPNVJ Achmad Nur Hidayat mengatakan masyarakat akan mengalami kesulitan. "Dengan kata lain, ada perubahan sistem distribusi yang signifikan, yang kemungkinan besar akan menyulitkan masyarakat kecil, terutama mereka yang tinggal jauh dari pangkalan resmi," kata Achmad dalam keterangan tertulis, Minggu (2/2/2025).

Kondisi ini juga dinilai akan menambah ongkos logistik dalam bentuk biaya transportasi maupun waktu yang lebih lama untuk mendapatkan gas. Menurut perhitungannya, biaya tambahan pembelian gas melon merata berkisar antara Rp5.000 hingga Rp15.000 per tabung. Artinya, LPG 3 kg yang semula berkisar antara Rp18.500 hingga Rp23.000 per tabung kini menjadi Rp25.000 hingga Rp38.000 per tabung.

Dia juga menyoroti potensi terjadinya pasar gelap atau jalur distribusi yang tidak resmi dengan menawarkan harga LPG yang lebih tinggi karena kelangkaan di tingkat masyarakat bawah.

Padahal, tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memastikan LPG 3 kg hanya sampai kepada mereka yang benar-benar berhak menerima subsidi. "Masyarakat yang tidak memiliki akses ke pangkalan resmi mungkin akan mengalami kesulitan mendapatkan gas dengan harga yang wajar," ujarnya.

Kondisi ini juga memicu terjadinya monopoli distribusi di tangan pangkalan resmi, sementara masyarakat kecil yang selama ini mengandalkan pengecer akan kehilangan fleksibilitas dalam mendapatkan gas bersubsidi. "Mereka akan dipaksa mengikuti aturan yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan kenyataan di lapangan," jelasnya.

Bukan hanya membatasi akses masyarakat kecil terhadap LPG bersubsidi, jelasnya, larangan tersebut juga meningkatkan biaya logistik yang pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap inflasi nasional. Dengan meningkatnya ongkos transportasi dan aksesibilitas yang terbatas, harga

LPG melonjak serta pelaku UMKM harus menanggung beban operasional tambahan.

"Biaya tambahan ini pada akhirnya ditransfer ke harga jual produk dan jasa mereka, yang secara langsung berdampak pada harga-harga kebutuhan pokok di masyarakat," tuturnya.

Selain itu, ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan LPG 3 kg dengan harga yang terjangkau juga meningkatkan tekanan terhadap daya beli mereka. Kondisi ini mengurangi kapasitas konsumsi rumah tangga, memperlambat pertumbuhan ekonomi sektor mikro, dan menambah tekanan inflasi yang sudah tinggi akibat faktor eksternal lainnya.

"Dengan demikian, kebijakan ini seharusnya dievaluasi kembali, karena dampaknya tidak hanya menimpa penerima manfaat subsidi, tetapi juga mengganggu stabilitas harga nasional," tegasnya.

Di sisi lain, tujuan pemerintah untuk mengendalikan harga LPG 3 kg dinilai tak akan tercapai dengan kebijakan pembatasan distribusi itu. Menurutnya, jika akses masyarakat terhadap LPG 3 kg menjadi lebih terbatas, harga di lapangan bisa semakin tidak terkendali. Dalam mekanisme pasar, kelangkaan akses sering kali berujung pada kenaikan harga.

Jika pangkalan resmi tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jumlah yang cukup, maka akan terjadi peningkatan permintaan yang tidak seimbang dengan pasokan yang tersedia. Hal ini akan memberikan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memainkan harga.

Selain itu, kebijakan tersebut juga bisa menyebabkan munculnya spekulasi yang akan memanfaatkan kelangkaan di tingkat masyarakat bawah untuk menjual LPG dengan harga lebih tinggi dari yang seharusnya.

Akibatnya, masyarakat yang justru seharusnya mendapat subsidi akan tetap menghadapi harga yang mahal, bahkan mungkin lebih tinggi dibandingkan saat mereka masih bisa membelinya dari pengecer.

Keluhan warga terkait sulitnya mencari LPG tabung hijau mengalir dari seluruh pelosok. Udin, warga Ciledug Kota Tangerang mengatak-an peraturan tersebut justru membuat rakyat kecil makin susah.

"Bukannya bikin mudah, malah bikin susah rakyat kecil," keluhnya, Minggu (2/2/2025).

Udin mengaku untuk memasak saja harus kelimpungan mencari persediaan gas 3 kg. Hal ini lantaran tiap warung yang dia datangi kehabisan stok.

"Sekarang gas elpiji 3 kg jadi

kayak barang ghoib. Di carinya susah. Padahal mau beli bukan meminta," ucapnya.

Ungkapan senada disampaikan warga Surabaya, Siti Nur. Ibu rumah tangga ini juga mengeluh karena kesulitan mencari gas elpiji 3 kg. "Sudah muter-muter ke SPBU, warung Madura, tetapi gas 3 kg pada kosong," katanya.

Aminah tidak setuju dengan kebijakan yang melarang warung pengecer menjual gas 3 kg apabila tidak beralih menjadi pangkalan.

"Terus kalau tengah malam lagi memasak tiba-tiba gasnya habis, harus ke pangkalan gitu? makin nyusahin aja pemerintahan," ungkap kecewa Aminah.

Pemerintah Janji Evaluasi

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi kebijakan larangan penyaluran LPG 3 kilogram (kg) melalui pengecer jika banyak masalah yang ditemukan.

Prasetyo menjelaskan, pemerintah akan terus memantau implementasi kebijakan tersebut. Salah satunya, melalui platform media sosial.

"Kita terus mengevaluasi kalau ada keluhan-keluhan atau ada problem-problem di masyarakat. Terima kasih sekarang juga oleh media sosial itu juga banyak. Kita bisa memonitor kejadian-kejadian," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Prasetyo menjelaskan kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah untuk memastikan penerima subsidi LPG 3 kg tepat sasaran.

Ia mengklaim, kebijakan tersebut bukan berniat untuk mempersulit masyarakat dalam mengakses salah satu kebutuhan pokok sehari-hari itu.

"Ya, kan, memang begini ya. Pertama adalah semua memang harus kita rapikan, ya. LPG 3 kg ini, kan, adalah, ada subsidi di situ dari pemerintah," jelas dia.

"Sehingga kita berharap yang namanya subsidi ya, kita penginnya diterima oleh yang berat, kan, kira-kira begitu. Jadi bukan untuk mempersulit, tidak," sambungnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengharuskan pengecer beralih menjadi pangkalan resmi untuk bisa mendapatkan stok gas melon untuk dijual. Caranya, dengan mendaftarkan nomor induk perusahaan ke PT Pertamina.

Pengecer yang belum memiliki nomor induk berusaha bisa membuatnya melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).

Pemerintah memberikan waktu satu bulan bagi pengecer untuk mendaftarkan usahanya menjadi pangkalan resmi penjual LPG 3 kg.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga memastikan harga pembelian gas bersubsidi atau LPG 3kg di pangkalan resmi akan lebih murah dibandingkan harga jual di warung atau toko kelontong.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, hal tersebut lantaran harga jual LPG Melon pada pangkalan resmi akan merujuk pada harga eceran tertinggi (HET) -- ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2021.

Aturan tersebut juga mengamanatkan masing-masing pemerintah daerah (Pemda) untuk menyesuaikan dan menetapkan HET di wilayahnya.

"Bagi masyarakat, pembelian di pangkalan resmi LPG 3kg tentu lebih murah harganya dibandingkan pengecer karena harga yang di jual sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing wilayah," ujar Heppy dalam siaran resminya dikutip, Minggu (2/2/2025).

Selain itu, kata dia, masyarakat juga bisa memeriksa ukuran atau bobot gas melon yang dibeli pada pangkalan resmi. Menurut dia, petugas pangkalan Pertamina selalu memastikan dan menyiapkan timbangan agar masyarakat menerima LPG sesuai bobotnya.

Informasi ini dikeluarkan usai muncul sejumlah polemik tentang keberadaan LPG 3Kg yang menjadi langka. Selain itu, sejumlah masyarakat juga mengeluhkan dengan semakin ketatnya proses pembelian yang mewajibkan turut menyertakan KTP tersebut.

Sementara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada kelangkaan tabung gas LPG 3 kg. Sebab, Bahlil menyebut kebutuhan terhadap gas LPG 3 kg tahun 2024 dengan 2025 sama.

"Kelangkaan daripada LPG itu sebenarnya enggak ada, enggak ada. Kenapa? Karena semua kebutuhan dari tahun 2024 ke 2025, volumenya sama, dan kami siapkan sekarang," kata Bahlil kepada wartawan di kawasan Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025).

Bahlil menjelaskan yang terjadi saat ini bukanlah kelangkaan, tapi proses perubahan dari pengecer menjadi pangkalan. Menurutnya, pemerintah telah menganalisa dan menunjukkan bahwa masih terjadi kenaikan di tingkat pengecer yang memberatkan masyarakat.

Dia mengatakan saat ini pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan supaya masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai jika membeli langsung di pangkalan. (din, wid, rls, ant, ist/dya)



Tanggulangi Banjir, DPRD Surabaya Bentuk Panitia Khusus

SURABAYA-DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna, Rabu (23/1/2025) lalu, sebagai langkah awal dimulainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk pengendalian dan penanggulangan banjir. Pembahasan rancangan regulasi itu merupakan inisiatif para wakil rakyat, meneruskan gagasan yang digulirkan pada periode lalu.

“Reperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir ini merupakan inisiatif DPRD, yang dicetuskan pada periode lalu, yang diteruskan oleh kami periode sekarang. Setelah disusun dan diharmonisasi oleh Badan Pembuat Perda (Bapemperda), raperda ini disepakati antara DPRD dan Pemkot Surabaya untuk dibahas, kemudian dijadwalkan oleh Badan Musyawarah untuk mulai dibahas di rapat paripurna DPRD,” kata Adi Sutarijono, Ketua DPRD Kota Surabaya dikutip Minggu (2/2/2025).

Dikatakan, pembahasan raperda itu secara lebih detail dan teknis dilakukan di tingkat panitia khusus (Pansus). Kelak, Pansus akan mengundang perwakilan masyarakat dan dinas-dinas teknis terkait solusi pengendalian banjir di Kota Pahlawan.

“Diharapkan, pembahasan itu bisa menghasilkan rumusan kebijakan yang bisa diterapkan di lapangan untuk penanganan banjir. Termasuk mengatur hak dan kewajiban antara berbagai pihak, diantaranya masyarakat, swasta dan Pemerintah Kota Surabaya,” kata Adi.

Pembahasan Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir berlangsung di saat tepat, ketika Surabaya sedang memasuki musim penghujan. Ketika curah hujan deras, dan kiriman air dari berbagai daerah masuk ke Surabaya, sementara di pihak lain air laut sedang pasang, banyak sekali keluhan warga



Salah satu proyek penanggulangan banjir yang ada di Kota Surabaya. Tahun ini dianggarkan Rp 1,4 triliun untuk pencegahan dan penanggulangan banjir di Surabaya. (Ist)

masyarakat yang kawasannya kebanjiran.

“Bahkan, ada beberapa kawasan yang di masa sebelumnya tidak pernah banjir, di musim penghujan kali ini warga masyarakat di sejumlah kawasan dan pemukiman mengeluhkan kebanjiran. Di musim penghujan kali ini, juga terjadi ada tanggul jebol sehingga terendam air,” kata Adi.

Belum lagi, diperlukannya sinergi dan kolaborasi dengan instansi vertikal dan antar daerah karena menyangkut kewenangan atas sungai dan jalan. Termasuk diantaranya pembersihan sungai dari enceng gondok, lumpur dan kotoran lain sehingga mencegah pendangkalan. Adi berharap pembahasan di tingkat panitia khusus DPRD bisa memetakan persoalan dengan seksama, berikut penanganannya.

DPRD Kota Surabaya juga menyambut terbuka dan memberikan apresiasi positif kepada Wali Kota Eri Cahyadi yang membangun kolaborasi dengan seluruh stakeholder masyarakat, termasuk melibatkan jajaran TNI dan Polri, dalam menjaga pembangunan Kota Surabaya.

“Disepakatinya pembahasan Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir juga menjadi penanda yang cukup jelas dari Wali Kota Eri Cahyadi dan jajaran Pemerintah Kota Surabaya untuk

menerima masukan-masukan, saran dan kritik dari semua pihak untuk penanganan banjir di kota ini. Kami dari DPRD Surabaya mengapresiasi sikap terbuka dan kolaboratif,” ujar Adi.

Normalisasi Sungai hingga Penyediaan Pompa Air

Salah satu item isu pembahasan raperda itu adalah melakukan normalisasi sungai, yang harus dibicarakan dengan pihak-pihak terkait. Karena, kondisi sungai saat ini jauh menyempit. Badan sungai berganti dengan bangunan rumah dan kawasan pemukiman warga. “Ini akan menjadi bahan pembahasan yang intens di tingkat panitia khusus,” kata Adi.

Begitu pula pemenuhan infrastruktur, seperti pembenahan saluran air, penyediaan pompa-pompa air, pembuatan sudetan, pembuatan waduk-waduk atau bozem untuk penampung air. Soal infrastruktur banjir, nanti akan dibahas di tingkat panitia khusus.

“Begitu pula pembuatan atau penyempurnaan peta saluran air, yang melibatkan partisipasi warga masyarakat hingga ujung tombak pemerintahan paling bawah seperti RT/RW,” ujar Adi.

Diharapkan, kinerja panitia khusus dapat menggodok Raperda

Pengendalian dan Penanggulangan Banjir bersama Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya menghasilkan produk hukum berupa peraturan daerah. Sehingga ke depan bisa menjadi payung hukum penerapan kebijakan publik yang dapat menanggulangi ancaman banjir di Kota Surabaya.

“Begitu pula penerapan indikator-indikator yang jelas dalam penanganan banjir, seperti luas genangan air, lama genangan air, dan tinggi genangan air yang telah lama diterapkan di Kota Surabaya. Sehingga terobosan-terobosan pembangunan, bisa dievaluasi efektivitas hasilnya,” kata Adi.(Adv,Ama/Dya)



Disepakatinya pembahasan Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir juga menjadi penanda yang cukup jelas dari Wali Kota Eri Cahyadi dan jajaran Pemerintah Kota Surabaya untuk menerima masukan-masukan, saran dan kritik dari semua pihak untuk penanganan banjir di kota ini. Kami dari DPRD Surabaya mengapresiasi sikap terbuka dan kolaboratif.”

ADI SUTARIJONO
Ketua DPRD
Kota Surabaya